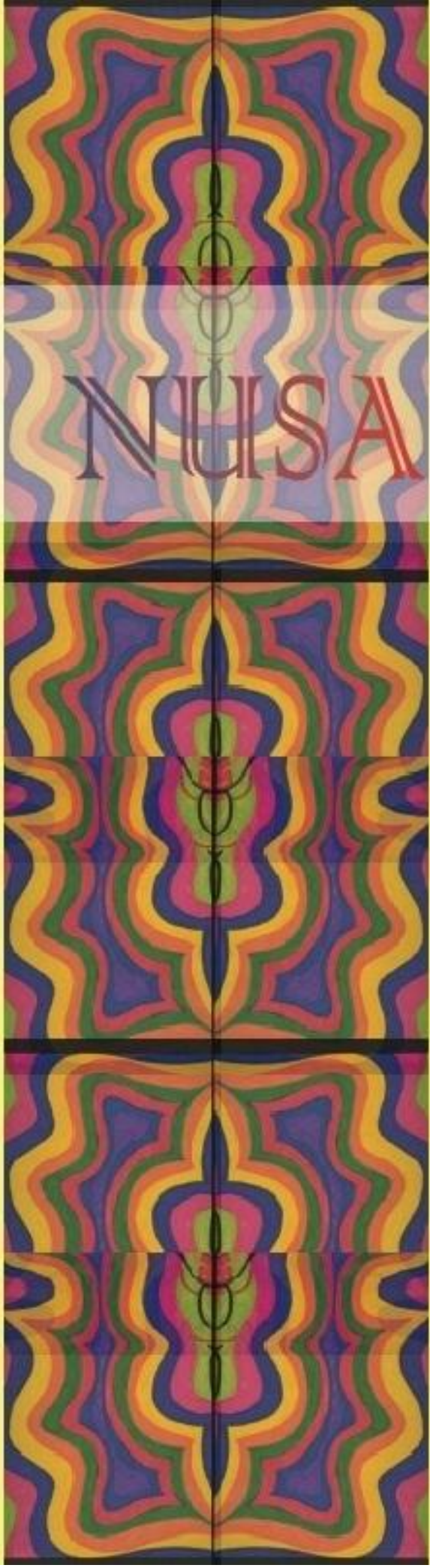


ISSN : 1411 - 2396



JURNAL
NUISA **CENDANA**

Volume XXII Nomor 4
Oktober 2021
Hal. 1 - 82

Diterbitkan Oleh
Lembaga Penelitian
Universitas Nusa Cendana

ISSN : 1411 - 2396

JURNAL NUSA CENDANA

Volume XXII Nomor 4
Oktober 2021
Hal. 1 - 82

Diterbitkan Oleh
Lembaga Penelitian
Universitas Nusa Cendana



Dewan Pengarah
Rektor Universitas Nusa Cendana
Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Nusa Cendana
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana

Penyunting/Penanggung Jawab
Felix Tans

Wakil Ketua Penyunting
Ludji M. Riwo Kaho

Penyunting Pelaksana
Johnson W. Haan
Marcel Robot
Hironimus Jati

Penyunting Ahli
Andrian Vickers (Universitas Sidney)
Agustinus S. Benu (Undana)
Aloysius Liliweri (Undana)
David B.W. Pandie (Undana)
Dwi Noverini Jenar (Universitas Sidney)
Eben Nuban Timo (Universita Kristen Artha Wacana)
G.T. Selly Tokan (Undana)
H. Ali Saukah (Universitas Negeri Malang)
I Gusti Bagus Arjana (Undana)
Jimmy Pello (Undana)
Josua Bire (Undana)
Leon Verstapen (Universitas Groningen)
Mary Ann Maslak (Universitas St. John New York)
Nobertus Jegalus (Universitas Katolik Widya Mandira)
Paul Budi Kle den (STFK St. Paulus Ledalero)
Peter Mahmud Marzuki (Unair Surabaya)
Sisilia Halimi (Universitas Indonesia)

Editor/Layout
Yohanes K.N.Liliweri

Tata Usaha
Karolina K. Sangkala
Fredyk Haba Djingi
Markus Bahan
Paul Wila

JURNAL NUSA CENDANA

Terbit empat kali setahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil Penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora

Jurnal Nusa Cendana merupakan nama baru dari *Jurnal Penelitian Universitas Nusa Cendana* yang diterbitkan sejak November 1997 oleh Lembaga Penelitian Undana. Perubahan nama menjadi *Jurnal Nusa Cendana* mulai berlaku sejak 1 Januari 2000. Standar pengutipan jurnal ini, adalah *J. Nusa Cendana*. Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia dan diketik diatas kertas HVS (A4) sesuai dengan format yang tercantum pada kulit dalam-belakang (*Persyaratan Naskah Jurnal Nusa Cendana*). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya. Dewan Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengubah isi.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha :
Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana (Undana) Jl. Adisucipto, Kampus Baru,
Perfui, Kupang, NTT, Indonesia. Kode Pos 850001. Atau P.O. Box 1212, Kupang
Telp./Fax (0380) 881560
Email : jurnalno@yahoo.com

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| Hal. 1 – 15 | <i>Made Ngurah D. Andayana dan Primus Lake</i> |
| Pemberdayaan Sdm Pada Badan Usaha Milik Desa Di Sektor Kepariwisata Kabupaten Kupang | |
| Hal. 16 - 20 | <i>Sumi N. A. Ola Kote, Hamza H. Wulakada, Sunimbar</i> |
| Dampak Ketersediaan Irigasi Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua | |
| Hal. 21 - 27 | <i>Ni Kadek Fadmawati Putri, Rolland E. Fanggidae, Ni Putu Nursiani</i> |
| Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Semen Kupang (Persero) | |
| Hal. 28 - 34 | <i>Gabriel S. Opat dan Esrah D.N.A. Benu</i> |
| Gerakan Sosial Politik Masyarakat Dalam Penolakan Pertambangan Galian C Di Kali Noemuti (Studi Perlawanan Sosial Politik Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara) | |
| Hal. 35 - 39 | <i>Yerahmeel Soimbala, Mikael Samin, Natalia Adel H. N. Mari</i> |
| Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Sebagai Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di Desa Nunkolo Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan) | |
| Hal. 40 – 43 | <i>Rosmeilani Angelin Lusi dan Maria E. D. Tunti</i> |
| Analisis Pengaruh <i>Locus Of Control</i> Dan Kompleksitas Tugas Audit Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Pada Auditor Internal Pemerintah Yang Bekerja Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur) | |
| Hal. 44 - 49 | <i>Heni Jati Tunbonat, Mikael Samin, Natalia Adel H. N. Mari</i> |
| Usaha Industri Kerupuk Singkong Di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang | |
| Hal. 50 – 54 | <i>Elisabet Yanuarita Goang, Ignasius Suban Angin, Hamza H. Wulakada</i> |
| Tinjauan Geografi Perilaku Adaptasi Petani Padi Sawah Terhadap Kekeringan Ekstrim Di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah - Kabupaten Kupang | |
| Hal. 55 – 62 | <i>Kristina Letek Kelen, Hamza H. Wulakada, Arfita Rahmawati</i> |
| Pengembangan Potensi Objek Wisata Air Panas Yang Berkelanjutan Di Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur | |
| Hal. 63 - 69 | <i>David A. L. Mesak, Rolland E. Fanggidae, Wehelmina M. Ndoen</i> |
| pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Kupang | |
| Hal. 70 - 76 | <i>Vonny Alviony Pulungtana, Hamzah H. Wulakada, Mikael Samin</i> |
| Tinjauan Geografi Perilaku Petani Tanaman Pangan Dalam Siaga, Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Kekeringan Di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang | |
| Hal. 77 - 82 | <i>Edwardus Iwantri Goma, Aisyah Tress sandy, Christofelas Adios Sambora, Maria Josebia Pangestuti, Enggi Hasballah</i> |
| Tinjauan Geografi Perilaku Petani Tanaman Pangan Dalam Siaga, Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Kekeringan Di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang | |

ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Edwardus Iwantri Goma, Aisyah Tress sandy, Christofelas Adios Sambora,
Maria Josebia Pangestuti, Enggi Hasballah

edgoma27@gmail.com

ABSTRAK

Pemindahan Ibukota negara di wilayah Pulau Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah sendiri, pejabat, instansi-instansi, pengamat lingkungan, mahasiswa, dan masyarakat serta pihak lainnya. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu 1) Editing; 2) Organizing; dan 3) Finding: Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu 1) Reduksi data (data reduction); 2) Display data dan; 3) Gambaran kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemindahan ibukota menambah persentase wilayah permukiman untuk kebutuhan masyarakat. Perkembangan wilayah permukiman tersebut pasti akan mengambil persentase bagian dari wilayah lahan peruntukan yang lainnya untuk dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau transmigran.

Kata Kunci: Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Penggunaan Lahan

A. PENDAHULUAN

Banyak pendapat mengatakan bahwa cerminan atau gambaran suatu negara dapat dilihat dari bagaimana keadaan ibukotanya. Ibukota negara menjadi salah satu wilayah yang paling utama dari wilayah yang lainnya. Wilayah ibukota negara dianggap sebagai wilayah yang paling vital dan strategis. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah ibukota dalam suatu negara bersifat multifungsi, baik sebagai pusat pemerintahan dan politik, pusat perekonomian, pusat pendidikan pusat budaya, dan pusat-pusat yang lainnya.

Pemindahan Ibukota negara di wilayah Pulau Kalimantan Timur tepatnya di bagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara mengundang banyak sekali pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah sendiri, pejabat, instansi-instansi, pengamat lingkungan, mahasiswa, dan masyarakat serta pihak lainnya. Sebagian pihak menganggap bahwa dengan adanya perpindahan ibukota baru di Kalimantan Timur khususnya wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) maka dapat memberikan dampak yang positif

seperti berkembang pesat dan majunya wilayah tersebut.

Pembangunan akan semakin merata dan taraf hidup masyarakat perlahan akan semakin meningkat. Namun dampak positif tersebut juga mengundang kecemasan diberbagai kalangan khususnya masyarakat dan para aktivis serta pemerhati lingkungan setempat. Dengan adanya pemindahan ibukota baru maka perlu penyediaan lahan bebas yang siap untuk dilakukan pembangunan proyek ibukota baru. Tentu saja pembangunan tersebut akan membutuhkan lahan yang luas dan memungkinkan untuk dilakukannya pembebasan lahan hutan yang padahal lahan hutan di Kalimantan Timur dianggap sebagai penyumbang wilayah hijau atau paru-paru dunia. Pembangunan proyek ibukota baru akan menyebabkan permasalahan baru terhadap lingkungan, baik semakin meningkatnya persentase deforestasi dan alihfungsi lahan di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari

fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alihfungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu dan individu dengan dengan pemerintah untuk kegiatan non pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut. Wacana rencana pemindahan dan pembangunan Ibukota negara baru dapat menimbulkan permasalahan alih fungsi lahan. Di satu sisi alih fungsi lahan ini menambah terbukanya lapangan kerja di sektor non-pertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Menurut Widjanarko et al (2006) dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain:

- a) Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
- b) Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
- c) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
- d) Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang

pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

- e) Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa yang terbaik dan telah terbentuk puluhan tahun, sedangkan pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Tengah, tidak memuaskan hasilnya.

Menurut Firman (2005) alih fungsi lahan dapat menimbulkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian. Sedangkan menurut Ruswandi et al (2007) secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan. Mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan kemudian mengolahnya merupakan langkah-langkah dalam Kajian kepustakaan. Sedangkan menurut Hadi (dalam Goma, 2019) studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data penelitian yang berasal dari perpustakaan untuk menyelesaikan suatu penelitian.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu 1) Editing: pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan,

kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain; 2) Organizing: mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan; 3) Finding: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu 1) Reduksi data (data reduction), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk menda-patkan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut; 2) Display data, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya; 3) Gambaran kesimpulan, setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti (Milya Sari & Asmendri, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Penajam Paser Utara atau disebut PPU adalah sebuah Kabupaten yang menjadi salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibukotanya terletak di Penajam. Penajam Paser Utara (PPU) merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir (kini Paser) pada tahun 2002. Sebagian dari daerah kabupaten ini dan Kabupaten Kutai Kartanegara akan dijadikan lokasi ibu kota baru. Wilayahnya terletak 117 Km di Barat Daya Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Letaknya berbatasan dengan Kota Balikpapan yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Wilayahnya termasuk strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Balikpapan dan sebagai pintu masuk Kalimantan Timur ke arah Selatan yang dilalui Jalan Negara yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kecamatan yang wilayahnya relatif luas dibanding kecamatan lain adalah

Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu.

Letak geografis wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berada diantara $00^{\circ}48'29''$ - $01^{\circ}36'37''$ LS dan $116^{\circ}19'30''$ - $116^{\circ}56'35''$ BT. Memiliki keseluruhan luas sebesar $3.333,065 \text{ Km}^2$, yang terbagi atas $3.060,82 \text{ Km}^2$ luas darat dan $272,24 \text{ Km}^2$ luas lautan, serta memiliki batas-batas wilayah meliputi: [a] Sebelah Utara: Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. [b] Sebelah Selatan: Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir dan Perairan Selat Makassar. [c] Sebelah Barat: Kecamatan Bongan Long Kali Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir. [d] Sebelah Timur: Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Perairan Selat Makassar.

Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara (jangka waktu 2011-2031) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tersebut mencakup ruang lingkup wilayah perencanaan tata ruang yang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku.

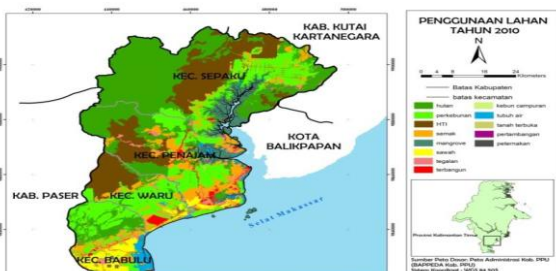
Berdasarkan rencana pola ruang pada Bab IV bagian pada paragraf 1 tentang kawasan perlindungan setempat, RTH kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 5.420 hektare atau lebih dari 30% dari seluruh luas kawasan perkotaan di wilayah kabupaten meliputi: [a] Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 1.946 hektar, [b] Kecamatan Waru dengan luas kurang lebih 765 hektar, [c] Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 790 hektare, [d] Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 1.919 hektare.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat pembagian kawasan lahan berdasarkan fungsi atau peruntukannya, dimana terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi konversi), kawasan peruntukan pertanian (kawasan pertanian tanaman pangan,

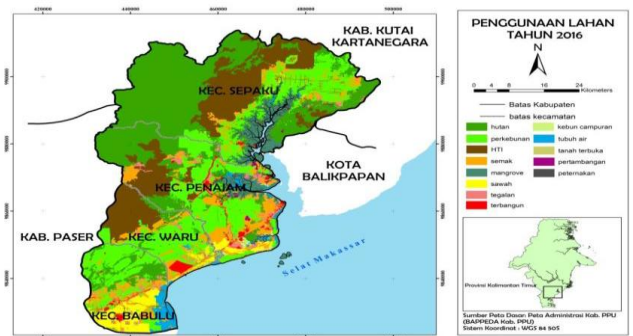
pertanian holtikultura, perkebunan, dan peternakan), kawasan peruntukan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pembangunan tempat pelelangan ikan, dan pembangunan pangkalan pendaratan ikan), kawasan peruntukan pertambangan (peruntukan pertambangan mineral dan batubara, peruntukan minyak dan gas bumi), kawasan peruntukan industri (peruntukan industri menengah, dan peruntukan industri kecil dan rumah tangga), kawasan peruntukan pariwisata (pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan), kawasan peruntukan permukiman (peruntukan permukiman perdesaan, dan peruntukan permukiman perkotaan), dan kawasan peruntukan lainnya.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara selama rentang waktu 2010 hingga 2016 didominasi oleh hutan (32.92%), perkebunan (25.51%), hutan tanaman industri (HTI) (17.09%), semak (8.76%) dan penggunaan lahan lainnya (15.72%). Penggunaan lahan hutan dan HTI dominan berada di Kecamatan Sepaku, sementara penggunaan lahan perkebunan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan jenis komoditas antara lain adalah kelapa sawit, karet dan kelapa (Widjayatnika, dkk., 2017). Sebagai salah satu wilayah yang ditetapkan menjadi lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Timur, penggunaan lahan sawah di Kabupaten Penajam Paser Utara belum mendominasi yaitu hanya 12,237 ha atau 3.85% dari luas wilayah. Sebagian besar sawah (70.28%) berada di Kecamatan Babulu seluas 8,601 ha. Peta penggunaan lahan tahun 2010 dan 2016 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta penggunaan lahan tahun 2010
Sumber: Widjayatnika, dkk., 2017



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2016
Sumber: Widjayatnika, dkk., 2017

Permasalahan Penggunaan Lahan yang Terjadi Serta Kemungkinan Dampak Akibat Wacana Pemindahan Ibukota Negara di Penajam Paser Utara (PPU)

Sebelum adanya wacana terkait pemindahan Ibukota negara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memang telah dilanda atau banyak mengalami permasalahan lingkungan khususnya terkait penggunaan lahan yang ada. Permasalahan lahan tersebut berupa alih fungsi lahan yang semakin tahun semakin meningkat. Persentase peningkatan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sangat cukup menyita perhatian pemerintah setempat mengingat PPU menjadi salah satu Kabupaten yang sangat diperhitungkan dalam produksi pertaniannya. Hampir seluruh wilayah Kabupaten PPU berupa lahan pertanian yang dimana kecamatan Sepaku dan Babulu memiliki wilayah pertanian yang paling besar.

Lahan pertanian yang dominan berupa hasil beras beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut terjadi karena masyarakat setempat ingin tetap mempertahankan lahan pertanian mereka. Lahan pertanian yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya berupa sistem pertanian tadah hujan (tata air mikro) yang mampu menghasilkan produksi atau panen hanya sekali dalam setahun. Hal tersebut membuat masyarakat sering mengalami gagal panen dan kerugian serta pendapatan yang minim. Masyarakat menganggap kelapa sawit mampu memproduksi 2-3 kali dalam setahun dan lebih menguntungkan. Pemicu utama akan hal tersebut adalah karena terbatas dan minimnya sarana pengairan irigasi dan sumber air masyarakat. Minimnya bendungan, kurangnya pintu-pintu air

pada saluran irigas, kesusakan sarana hingga terpercarnya lahan pertanian menyulitkan dalam pembagian air untuk masrakat dan kebutuhan lahan pertanian. Selain itu, kurangnya minat membuat kurangnya sumber daya manusia dalam sektor pertanian yang turut menyumbang faktor produktivitas pertanian semakin rendah dan berpindah menjadi alih fungsi lahan.

Pemicu lain terjadinya alihfungsi lahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pendatang, dimana pendatang menjadi masalah yang membuat semakin berkurangnya lahan pertanian dan hutan yang berubah menjadi kawasan permukiman. Pendatang mengambil beberapa bagian persentase perubahan alihfungsi lahan yang diperhitungkan. Dari beberapa faktor penyebab dan permasalahan terkait alih fungsi lahan yang memang telah ada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tersebut, pemindahan Ibukota negara mampu menambah faktor terjadinya penambahan persentase alih fungsi lahan disana. Dengan adanya pemindahan Ibukota negara disana maka tidak menutup kemungkinan untuk mengambil bagian persentase kawasan peruntukan lahan lainnya seperti lahan peruntukan hutan dan pertanian untuk dijadikan pusat pembangunan pemerintahan ibukota negara baru. Selain itu, dampak lain dari wacana pemindahan ibukota negara tersebut adalah semakin tergesur atau mengambil bagian wilayah adat atau ulayat yang ada disana.

Wilayah adat yang kemungkinan menjadi penyumbang kawasan hijau akan berubah menjadi pusat-pusat pembangunan. Kemungkinan terbesar yang akan terjadi bila pembangunan yang dilaksanakan tidak sangat hati-hati dan tidak melihat ekosistem maka akan mampu merusak kehidupan flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya pemindahan ibukota dan pembangunan lainnya maka akan semakin ikut berkembang pula wilayah PPU dan sekitarnya baik dalam segi ekonomi dan demografi. Akan semakin banyak pendatang yang menetap atau hanya sekedar bekerja, dimana akan semakin bertumbuh penduduk di wilayah PPU yang turut menambah persentase wilayah permukiman untuk kebutuhan masyarakat. Perkembangan wilayah permukiman tersebut pasti akan mengambil persentase bagian dari wilayah lahan peruntukan yang lainnya untuk

dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau transmigran.

D. KESIMPULAN

Pemindahan wilayah Ibukota negara baru di Kalimantan Timur khususnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara mengundang berbagai statement dari berbagai kalangan hingga menimbulkan pro dan kontra. Dimana terdapat dampak positif dari perpindahan Ibukota baru seperti perkembangan yang maju dan pesat di wilayah tersebut akibat pembangunan dan perlahan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Namun melihat dampak yang lain dari rencana pembangunan Ibukota negara baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pula sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Pembangunan tersebut mampu meningkatkan permasalahan lingkungan yang ada dalam wilayah tersebut.

Peningkatan persentase deforestasi dan alihfungsi lahan akan terjadi akibat pembebasan lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan. Sementara itu, alihfungsi lahan yang memang telah terjadi di Penajam Paser Utara akibat kondisi wilayah dan minimnya sarana irigasi dan drainase serta distribusi air yang mengakibatkan alihfungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit sudah cukup menjadi masalah yang belum teratasi, maka pemindahan dan pembangunan wilayah ibukota baru dianggap akan menambah persentase alihfungsi lahan dari berkurang nya wilayah hutan, wilayah adat atau lahan Ulayat, berkurang ruang hijau, dan sejenisnya menjadi wilayah pembangunan dan bahkan memicu perkembangan alihfungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman akibat perkembangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Benadikta Widjayatnika, dkk. 2017. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arah Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Oktober 2017, 1 (3): 243-257 DOI:

<http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.3.243-257>

- . Firman T. 2005. Konversi Lahan Pertanian dalam Perspektif Pengembangan Wilayah dan Kota. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM –IPB. Bogor.
- Goma, E. I. (2019). Situasi Keluarga Berencana Di Provinsi Kalimantan Timur. *Georafflesia*, 4(2), 201–210.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32663/georaf.v4i2.979>
- Milya Sari, A., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 15.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Ruswandi A. 2005. Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah. (Tesis). IPB. Bogor.
- RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara (2011-2031).
- Widjanarko, et al, 2006. Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah: 22-23. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN. Jakarta.